

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana Di Kota Semarang

Implementasi kebijakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi yang diarahkan pada penanggulangan bencana di Kota Semarang. Sehingga penelitian ini menekankan pada bagaimana penanggulangan bencana di Kota Semarang itu dilakukan. Pada proses implementasinya dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana.

Dalam regulasi tersebut, disebutkan tiga fenomena yang dilakukan pada penanggulangan bencana, yaitu (1) pra bencana, (2) tanggap darurat bencana, dan (3) pasca bencana. Ketiga fenomena tersebut sebagai landasan dalam upaya tercapainya penanggulangan bencana di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian pada implementasi kebijakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang, pada tahapan pra bencana masih menemui kendala di lapangan, yaitu:

4.1.1 Pra Bencana

Penanggulangan pada pra bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengurangi kerugian harta dan korban manusia yang disebabkan oleh bahaya dan juga memastikan bahwa kerugian yang ada juga minimal ketika terjadi bencana.

Pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana meliputi pemetaan daerah rawan bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

a. Pemetaan Daerah Rawan Bencana

Daerah rawan bencana merupakan kawasan yang mempunyai kerentanan bencana. Kemudian yang dimaksud dengan pemetaan daerah rawan bencana bermaksud untuk menentukan lokasi daerah rawan bencana yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penanggulangan bencana. Pemetaan ini juga berguna untuk mengantisipasi dan evakuasi bila bencana datang. Kemudian sasarannya adalah

tersedianya peta lokasi daerah rawan bencana yang akan membantu pengambil keputusan untuk bertindak dalam masa sebelum bencana

Pemetaan daerah rawan bencana untuk melaksanakan upaya dalam penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana yang pertama. Dimana pada proses pendataan meliputi wilayah per kelurahan, terutama di tempat-tempat yang diprediksi rawan akan bencana. Contohnya adalah di Kelurahan Bugangan rawan akan rob dan banjir, Kelurahan Ladeharjo juga rawan akan rob dan banjir, dan Gunung Pati rawan akan tanah longsor.

Persebaran daerah rawan bencana dapat diketahui secara lebih mudah melalui peta. Sebab jika tidak digambarkan kedalam bentuk peta, persebaran daerah rawan akan hanya bersifat informasi diskriptif, sehingga membuat penerima informasi baik pemerintah maupun khalayak umum akan kesulitan mengetahui persebaran daerah-daerah rawan longsor secara pasti. Oleh karena itu penggambaran secara visual dengan peta sangat perlu dilakukan untuk memberikan gambaran spasial terhadap daerah mengenai persebaran daerah yang rawan bencana.

Pemetaan daerah rawan bencana yang dilakukan menjadi penting dalam rangka memberikan sebuah peringatan dini kepada masyarakat mengenai lokasi-lokasi yang dianggap beresiko tinggi terhadap bencana dan lokasi-lokasi yang aman dari bencana.

BPBD Kota Semarang dalam melakukan pemetaan daerah rawan bencana, langkah awal yang dilakukan adalah terlebih dahulu dengan melakukan kajian risiko bencana terhadap daerah tersebut. Dalam menghitung risiko bencana (*risk*)

sebuah daerah adalah dengan mengetahui bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*).

b. Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Selain pemetaan daerah rawan bencana yang dimaksudkan untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat, yang menjadi tugas dari pemerintah dalam penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana adalah upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.

Masyarakat adalah sebagai sasaran dari upaya peningkatan kapasitas ini, mengingat masyarakat sebagai pihak yang secara langsung terkena dampak apabila terjadinya bencana. Namun agar tidak ketergantungan kepada pemerintah, perlu adanya peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan bencana, yaitu dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar selalu bersih dan sehat, kemudian tidak membuang sampah di tempat pembuangan air, dan dilakukannya kerja bakti. Pemerintah juga turut serta dalam memberikan sosialisasi dan simulasi tentang kebencanaan.

Peningkatan kapasitas masyarakat yang dimaksudkan untuk bersiaga dalam mencegah dan mengurangi dampak dan risiko bencana yang terjadi di lingkungan terdekatnya adalah dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan agar selalu bersih dan sehat dan melakukan kerja bakti rutin di lingkungan masyarakat. Peningkatan masyarakat tersebut merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan bencana yang dilakukan di lokasi rawan bencana.

c. Pengurangan Risiko Bencana

Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, memerlukan upaya antisipatif untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari kerugian tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko bencana telah di upayakan.

Terkait dengan daerah yang dianggap rawan bencana, perlu adanya kegiatan dalam pengurangan risiko yaitu pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan untuk selalu menjaga kebersihan. Untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, masyarakat harus melakukan pembersihan di lingkungannya. Jika lingkungan tidak terawat, bencana akan mudah terjadi. Banjir, rob, dan tanah longsor menjadi salah satu bencana yang mungkin terjadi. Kemudian penanaman mangroove dilakukan untuk mengurangi risiko bencana rob. Dalam mengantisipasi banjir ataupun rob yang bisa sewaktu-waktu datang, adalah dengan mempersiapkan karung-karung berisi tanah untuk membuat tanggul-tanggul.

Upaya pengurangan risiko bencana sebagai bentuk dalam kesiapsiagaan merupakan bentuk upaya-upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana, termasuk melalui pengurangan terhadap ancaman bahaya, pengurangan kerentanan penduduk dan harta benda, peningkatan SDM, sosialisasi, dan peningkatan kelembagaan.

Meskipun pada umumnya bencana tidak mungkin dicegah, akan tetapi lebih baik apabila dilakukan usaha-usaha pengurangan risiko bencana. Serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana dilakukan baik dalam pembangunan fisik

maupun pembangunan non fisik. Sehingga dapat dapat meminimalisir apabila terjadinya bencana.

d. Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat

Kesiapsiagaan adalah perkiraan-perkiraan tentang kebutuhan yang akan timbul jika terjadi bencana dan memastikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan demikian, kesiapsiagaan akan membawa masyarakat di daerah rawan bencana pada tataran kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi bencana. Kegiatan kesiapsiagaan meletakkan aturan-aturan penanggulangan kedaruratan sedemikian rupa sehingga menjadi efektif.

Kesiapsiagaan masyarakat juga perlu adanya peningkatan dalam upaya menghadapi kemungkinan terjadi bencana. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan bersama, dan saling tukar ilmu tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Dalam upaya memobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana memerlukan upaya antisipatif untuk mengurangi dampak kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana. Dalam upaya memobilisasi dengan menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk selalu siap siaga bencana karena bencana yang bisa datang kapan saja dan dimana saja. Kemudian TAGANA juga memantau keadaan daerahnya dan juga menerima laporan dari masyarakat apabila terjadinya bencana.

Dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi, kesiapsiagaan yang dilakukan ini lebih ditekankan adalah melatih

dan memberikan bimbingan kepada masyarakat agar dapat siap apabila terjadinya bencana.

e. Peringatan Dini

Terkait dengan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi peringatan dini sebelum terjadinya bencana, upaya Pemerintah Kota Semarang adalah mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana dan mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Atas bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi, adanya sistem deteksi dini merupakan hal yang perlu dilakukan.

Peringatan dini dimaksudkan sebagai serangkaian proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukam dengan sistematis serta diseminasi informasi tentang keberadaan bahaya. Peringatan dini digunakan untuk mengantisipasi eskalasi bahaya, mengembangkan strategi tanggap, dan untuk bahan pengambilan keputusan terhadap kemungkinan akan terjadinya bencana. Tujuan dari peringatan dini adalah menurunkan kualitas dan kuantitas jumlah korban bencana (apabila bencana itu terjadi). Dalam pemberian peringatan dini, harus menjangkau masyarakat, segera, tegas, dan bersifat resmi.

Sistem deteksi dini kepada masyarakat pun dilakukan dalam kemungkinan terjadinya bencana, yaitu dengan menandai waktu-waktu dominan terjadinya bencana, misalnya banjir dan rob. Hal itu untuk memprediksikan waktu-waktu kapan saja bencana akan terjadi di hari-hari kemudian. *Early Warning System* juga merupakan deteksi dini kepada masyarakat. *Early Warning System* adalah sebuah

sistem untuk memberitahukan akan timbulnya bencana yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Dinas PSDA).

Berdasarkan hasil penelitian pada tahapan pra bencana, diketahui bahwa bencana alam tidak mungkin untuk dihindarkan, tetapi akan lebih baik apabila terdapat usaha-usaha pencegahan atau pengurangan bencana alam. Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko pada pra bencana, baik melalui pembangunan fisik, penyadaran, dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bahaya bencana.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan berbagai upaya tersebut tidak dapat dikatakan sepenuhnya berhasil karena pada faktanya masih terdapat masyarakat yang masih belum bisa menjaga kebersihan lingkungannya. Sehingga bencana seperti rob maupun banjir bisa sewaktu-waktu terjadi. Kemudian belum berjalan secara maksimal dikarenakan terdapat kendala-kendala di lapangan yang dihadapi yaitu dengan ditujukannya adanya perbedaan pernyataan diantara informan. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang pada pra bencana belum dapat berjalan dengan baik.

4.1.2 Tanggap Darurat Bencana

Penanggulangan Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana yang bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi sistem kaji cepat, pendataan korban bencana, evakuasi ke penampungan sementara, dapur umum, dan pemberian logistik.

a. Sistem Kaji Cepat

Pelaksanaan pada tahapan tanggap darurat bencana dalam penanggulangan bencana dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan kaji cepat. Sistem kaji cepat adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan dalam memberika respon bencana dengan cepat dan tepat.

Dalam proses mengkaji dengan cepat lalu melaporkan hasil identifikasi dan memberikan sebuah rekomendasi kepada instansi terkait memerlukan adanya koordinasi yang baik. Untuk proses mengkaji dengan cepat yaitu mendatangi tempat lokasi bencana contohnya lokasi bencana banjir maupun bencana akibat rob maupun bencana yang lainnya seperti tanah longsor dengan mendata tempat kemudian untuk waktunya kemudian akibat yang ditimbulkan oleh bencana tersebut bisa jumlah korban maupun pengungsi yang ada di bencana terjadi. Kemudian setelah itu kita setelah mendata kita nanti ke dinas sosial atau instansi sosial untuk melaporkan kejadian bencana dengan cara berkoordinasi dengan instansi terkait supaya nanti bisa ditangani dengan cepat dan tepat.

Masyarakat juga dapat melaporkan ketika terjadinya sebuah bencana. Kemudian pemerintah memantau hasil laporan tersebut. Tim Reaksi Cepat akan memberikan pertolongan sesuai apa yang dibutuhkan. Misalkan terjadi kebakaran, maka mendatangkan mobil pemadam kebakaran. Apabila terjadi banjir maupun rob, maka dapat mendatangkan perahu karet maupun *speed boat*.

b. Pendataan Korban Bencana

Bencana yang menimpa di Kota Semarang tidak menutup kemungkinan akan membawa akibat jatuhnya korban. Oleh karena itu, diperlukan adanya

pendataan korban secara cepat dan akurat. Metode yang digunakan adalah dengan proaktif terjun ke lapangan sehingga data korban lebih akurat dan memungkinkan penyusunan peta lebih cepat dalam distribusi korban.

Untuk upaya mengidentifikasi dan mendata korban bencana, pemerintah mendatangi langsung ke lokasi kejadian lalu melaporkan untuk segera dicari penanganan yang dibutuhkan. Dalam hal pendataan kepada korban bencana, pemerintah telah proaktif dengan terjun ke lapangan sehingga data korban bencana lebih akurat. Kemudian melaporkannya ke dinas terkait dengan bekerja sama dengan DINSOSPORA.

c. Evakuasi ke Penampungan Sementara

Bencana yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi dimanapun dan kapanpun, maka pelaksanaan evakuasi korban bencana dari situasi tidak aman ke tempat lebih aman merupakan upaya yang dilakukan. Misalnya adalah apabila terjadi banjir maupun rob, maka evakuasi dilakukan ke tempat yang lebih tinggi.

Penampungan sementara dilakukan pada tempat seperti bangunan gedung yang aman, sekolah, kantor, stadion, atau gudang. Jika tidak memungkinkan, dapat ditempatkan di lapangan atau tempat terbuka, dengan mendirikan tenda-tenda. Untuk pengungsian yang cukup lama, dibuat hunian semi permanen berupa barak yang berisi beberapa keluarga sambil menunggu tindakan berikutnya.

Atas ancaman bahaya, upaya evakuasi pun dilakukan bersama-sama oleh TAGANA dengan pihak terkait yaitu pembentukan Kampung Siaga Bencana di tempat yang sering terjadi bencana. Kemudian bekerja sama juga dengan TNI,

POLRI, kelurahan, kecamatan, dan pihak lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penampungan sementara merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengevakuasi korban bencana dari tempat tinggal yang bermaksud untuk memindahkan korban untuk sementara waktu dari situasi yang tidak aman ke tempat yang lebih aman. Pelaksanaan operasional di penampungan sementara ini juga melibatkan peran serta dari masyarakat. Selain itu pula, pada lokasi penampungan sementara, pemerintah telah menyiapkan dokter, bidan, polisi, PMI, LSM, dan unsur pihak-pihak terkait guna memenuhi kebutuhan korban di lokasi penampungan sementara.

d. Dapur Umum

Pelaksanaan tanggap darurat bencana juga dilakukan pada bidang dapur umum. Dapur umum adalah dapur untuk umum yang menyiapkan dan menyediakan makanan dan dapat didistribusikan kepada korban bencana dalam waktu tepat dan cepat.

Dalam rangka untuk meringankan penderitaan para korban bencana, Pemerintah Kota Semarang mempunyai tugas yaitu adalah memberikan bantuan makanan kepada para korban. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk memperlancar pemenuhan kebutuhan makanan bagi korban bencana perlu diselenggarakan dapur umum.

Dapur umum diselenggarakan untuk menyediakan makanan dan kemudian didistribusikan kepada korban bencana dalam waktu cepat dan tepat. Sebagaimana yang ada pada hasil wawancara, dapur umum akan terselenggara apabila terdapat

banyaknya korban bencana. Apabila korban bencananya tidak sampai demikian, maka hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar terutama dari masyarakat yang tidak terkena bencana.

e. Pemberian Logistik

Operasi tanggap darurat pada bidang logistik adalah segala sesuatu yang berwujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terdiri dari barang habis pakai, misalnya sembilan bahan pokok (sembako), obat-obatan, pakaian, air, dan lain sebagainya. Kegiatan logistik meliputi inventarisasi, pemenuhan kebutuhan, pengadaan, pergudangan, dan pemusnahan. Persediaan logistik yang paling tepat adalah yang bersumber dari lokal (daerah setempat dan sekitarnya). Untuk mobilisasi logistik diperlukan unsur transportasi. Untuk mengatasi kendala yang satu ini dirancang untuk mendekatkan semacam tempat penyimpanan logistik di sekitar lokasi bencana.

Pelaksanaan operasi tanggap darurat pada bidang logistik ini melibatkan sistem kelembagaan antar instansi-instansi terkait. Selain itu juga dengan memaksimalkan kemampuan yang ada di masyarakat. Dalam operasi tanggap darurat bidang logistik ini juga harus tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan sesuai kebutuhan. Pelaksanaan ini berupaya untuk memaksimalkan kemampuan yang ada di masyarakat dengan pembantuan dari instansi terkait.

Berdasarkan hasil penelitian pada tanggap darurat bencana, diketahui bahwa bencana bisa sewaktu-waktu terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya sikap siap pada saat tanggap darurat bencana. Penggunaan alat komunikasi seperti *handy talk*

ataupun *handphone*, memudahkan untuk melakukan koordinasi antar pihak-pihak yang terkait. Kemudian juga alat komunikasi dapat dilakukan sewaktu masyarakat ingin melaporkan kejadian suatu bencana di daerahnya. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang pada tanggap darurat bencana sudah dapat berjalan dengan baik.

4.1.3 Pasca Bencana

Penanggulangan pasca bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat setelah kejadian bencana yang bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi pendataan kerugian material, pendataan kerusakan tempat tinggal, penanganan psikososial, dan pemulihan sosial.

Kondisi pasca bencana adalah keadaan suatu wilayah dalam proses pemulihan setelah terjadinya bencana. Pada kondisi ini dipelajari langkah apa yang dilakukan dalam hal upaya untuk mengembalikan tatanan masyarakat seperti semua sebelum terjadinya bencana.

a. Pendataan Kerugian Material

Pada saat pasca bencana, langkah awal adalah mengidentifikasi/ mendata kerugian material kepada korban bencana. Upaya yaitu dengan mendatangi langsung ke tempat terjadinya bencana. Kemudian melakukan mendata untuk mengetahui kerugian material yang dialaminya. Kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana ini membawa dampak yang tidak sedikit. Bukan hanya memakan korban jiwa, namun kerap membawa dampak kerugian materi.

Kemudian kerugian juga dialami pada kondisi jalan. Jalan yang rusak akibat terkikis merupakan dampak dari banjir maupun rob yang terjadi. Terkait jalan tersebut, pemerintah nampaknya belum begitu sepenuhnya konsisten terhadap hal itu. Jalan yang rusak tentu akan cukup membahayakan, misalnya akan menimbulkan tersendatnya jalan dan terjadinya kecelakaan.

Upaya proaktif juga dilakukan untuk mempersiapkan kapasitas kelembagaan dan membentuk SDM-SDM. Sehingga akan ada hasil pada tataran ketika pendataan kerugian material yang dialami oleh korban bencana.

b. Pendataan Kerusakan Tempat Tinggal

Kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana selain kerap membawa dampak kerugian materi, namun juga kerap membawa dampak terhadap kerusakan tempat tinggal. Sebuah tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah, tempat berteduh, atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat manusia tinggal.

Ketika bencana terjadi, maka ada kemungkinan terjadinya kerusakan pada tempat tinggal korban bencana. Oleh sebab itu TAGANA berupaya mendatanya dengan mendatangi ke korban bencana. Kemudian TAGANA mengklasifikasikannya ke dalam tiga kategori, yaitu: kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan parah.

c. Penanganan Psikososial

Keadaan psikososial merupakan gambaran hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Terkait dengan kebencanaan, keadaan psikososial korban bencana dari suasana gembira bisa berubah menjadi depresi, cemas, sedih, putus asa, dan lain sebagainya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa korban bencana akan mengalami kejenuhan. Kejenuhan yang diakibatkan berada di tempat pengungsian yang dikarenakan tempat tinggalnya tidak bisa ditempati. Walaupun korban bencana ada yang rela maupun tidak rela karena bencana yang telah meluluhlantahkan bangunan, harta, dan lain sebagainya, pemerintah berupaya untuk menanganinya dengan penanganan psikososial agar dapat mengurangi beban-beban yang dialami korban bencana.

Bencana membawa dampak pada psikologis korban bencana. Pelaksanaan dalam penanganan psikososial bertujuan untuk mengembalikan individu, keluarga, serta masyarakat agar setelah peristiwa bencana terjadi dapat secara bersama menjadi kuat dan memiliki ketangguhan menghadapi masalah sehingga menjadi produktif dan berdaya guna. TAGANA melihat terlebih dahulu keadaan korban apakah ada yang stres atau mengalami sedih berkelanjutan. Setelah itu merujuk ke psikolog atau tempat lain untuk dilakukan suatu penanganan psikososial. TAGANA juga berupaya dengan mengadakan penyuluhan dan penyegaran baik rohani maupun jasmani, dengan mendatangkan rohaniawan sesuai agamanya masing-masing dan pihak-pihak dari yang terlibat itu sendiri untuk turut serta dalam ‘mengayem-ayemi’ korban bencana seperti TAGANA, DINSOSPORA, BPBD, PMI, TNI, POLRI, dan lainnya.

Salah satu informan dari masyarakat mengatakan keadaan psikososialnya telah membaik dibandingkan pada saat bencana longsor yang terjadi di Trangkil, Gunung Pati. Namun yang penulis sayangkan adalah program psikososial ini tidak berkelanjutan. Yang mengakibatkan informan ini bisa sewaktu-waktu teringat akan kejadian tanah longsor tersebut yang telah meratakan rumahnya.

d. Pemulihan Sosial

Pemulihan merupakan awal upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari pembangunan pada umumnya. Pemulihan ini terkait dengan perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai dengan tingkat yang memadai. Sasarannya adalah normalisasi dan berfungsinya kembali secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Upaya pemulihan sosial korban bencana ini bertujuan agar masyarakat mampu melakukan tugas sosial seperti sebelum terjadinya bencana, serta tercegah dari mengalami dampak psikologis yang berlanjut yang mengarah pada gangguan kesehatan mental. Kemudian kerjasama antar SKPD dalam memberikan pemulihan sosial korban bencana diperlukan untuk saling bersama-sama menangani hal ini.

Berbagai upaya dilakukan oleh TAGANA dalam memberikan upaya penguatan dan pemulihan sosial korban bencana dengan memberikan pendampingan sesuai keadannya. Kemudian pemberian motivasi dan penyegaran agar nantinya bersemangat kembali melanjutkan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya dana CSR, peran serta swasta juga terlibat dengan hal ini untuk membantu penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil penelitian pada pasca bencana, diketahui bahwa penanggulangan pada pasca bencana adalah upaya perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar pada semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada pasca bencana. Namun masih adanya kendala-kendala yang menjadi dominan dibandingkan dengan yang mendukung. Oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang pada pasca bencana belum dapat berjalan dengan baik.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana Dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang

4.2.1 Faktor pendukung

Faktor pendukung pada Implementasi kebijakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang dapat dilihat dari dua faktor, yaitu: kesesuaian antara kebijakan dengan organisasi pelaksana dan dukungan masyarakat.

4.2.1.1 Kesesuaian antara kebijakan dengan organisasi pelaksana

Faktor pendukung yang pertama adalah kesesuaian antara kebijakan dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh kebijakan dengan kemampuan organisasi pelaksana. Apabila organisasi pelaksana

kebijakan tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh kebijakan, maka organisasi tidak dapat menyampaikan *output* kebijakan dengan tepat. Kebijakan menjadi sebuah pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dan cara bertindak. Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti penentuan prioritas.

Pelaksanaan dalam penanggulangan bencana tidak terlepas dari adanya suatu kesesuaian antara kebijakan dengan organisasi pelaksana. Kebijakan ini adalah dalam rangka melancarkan kegiatan kebencanaan di Kota Semarang dengan peran serta dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Implementasi kebijakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam Penanggulangan Bencana di Kota Semarang menjadi hal penting dalam hal ini. Kebijakan yang telah dikeluarkan dalam upaya penanggulangan bencana di Kota Semarang juga dapat dinilai melalui penilaian dari masyarakat, dimana masyarakat yang dimaksud adalah informan dalam penelitian ini. Hal ini menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak utama yang merasakan apakah Kota Semarang sudah layak atau belum dalam hal kebencanaan.

Kebijakan harus dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan efektif. Kota Semarang mempunyai beberapa peraturan yang menunjang terlaksananya kebijakan penanggulangan bencana. Kebijakan yang telah ada ini tidak terlepas

dari perilaku masyarakat. Ketika pemerintah sudah memiliki andil yang cukup kuat namun masyarakat tidak ikut serta dalam kebijakan tersebut maka hal ini akan berjalan tidak efektif.

4.2.1.2 Dukungan Masyarakat

Upaya penanggulangan bencana pada saat ini telah mengalami paradigma maupun tindakan. Penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jadi masyarakat tidak hanya sekedar menjadi objek dari bencana, namun juga sebagai pelaku dalam penanggulangan bencana.

Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus dapat dikatakan sebagai korban bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar. masyarakat menjadi aktor utama dalam menjalankan roda kehidupan bencana. Masyarakat memiliki peranan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa masyarakat Kota Semarang telah mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka penanggulangan bencana di Kota Semarang karena masyarakat menyadari akan arti penting terhadap penanggulangan bencana. Masyarakat Kota Semarang turut berperan dalam mendukung Pemerintah Kota Semarang untuk mengurangi intensitas bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Pemerintah memberikan sosialisasi dan simulasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana, sehingga apabila bencana terjadi, masyarakat sudah

mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum pihak pemerintah mendatangi lokasi kejadian bencana.

Metode yang tepat dalam penanganan bencana saat ini adalah kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat untuk menyiagakan diri dalam mencegah serta mengurangi dampak dan risiko bencana di lingkungan masyarakat. Kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat diteraokan karena masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak bencana, harus diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, sehingga mampu melakukan upaya-upaya penanganan dampak bencana dan pengurangan risiko bencana.

4.2.2 Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi kebijakan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 29 tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana dalam penanggulangan bencana di Kota Semarang dapat dilihat dari tiga faktor, yaitu: komunikasi, sumber daya manusia, dan sumber daya finansial.

4.2.2.1 Komunikasi

Komunikasi merupakan hal penting dalam proses implementasi kebijakan. Adanya kejelasan tujuan dan sasaran harus ditransmisikan kepada implementor dan masyarakat sehingga implementor dan masyarakat memahami pelaksanaan kebijakan tersebut. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, maka kemungkinan kebijakan yang dibuat tidak akan efektif.

Komunikasi merupakan faktor penghambat dalam implelementasi ini. Meskipun komunikasi dalam penanggulangan bencana ini sudah dilakukan dengan

melakukan melakukan hubungan komunikasi kepada masyarakat ataupun kepada instansi-instansi terkait misalnya dengan melakukan koordinasi yang baik dengan instansi-instansi terkait dan melakukan sosialisasi & pelatihan mengenai kebencanaan.

Namun terdapat kendala yang menjadi penghambat yaitu karena ego dari instansi-instansi terkait yaitu saling melempar tanggung jawab terkait kebencanaan ini. Kemudian dalam pelaporan kebencanaan yang belum lengkap ataupun data-data yang belum valid karena *miss communication*.

4.2.2.2 Sumber Daya Manusia

Meski kebijakan menjadi pendukung dalam proses implementasi, hal ini tidak terlepas dari sumber daya manusianya. Manusia merupakan faktor terpenting dalam proses implementasi karena manusia memiliki kemampuan pemahaman dalam suatu kebijakan bahwa akan menghasilkan terlaksananya kebijakan penanggulangan bencana dengan baik.

Faktor sumber daya manusia menjadi penghambat dalam implelementasi ini. Penghambat tersebut terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia baik secara kualitas maupun kuantitas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sehingga dalam implementasinya belum maksimal. Kendala yang ada pada aspek sumber daya manusia dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Semarang yaitu masih ditemukan kendala yaitu relawan-relawan TAGANA yang sudah berumur lanjut usia dan belum berjalannya regenerasi dengan baik. Kemudian dari segi kuantitas, jumlah yang

aktif masih terbilang minim dengan jarak jangkauan bencana yaitu di Kota Semarang, sehingga belum tercapai secara maksimal.

4.2.2.3 Sumber Daya Finansial

Meski kebijakan menjadi pendukung dalam proses implementasi, hal ini tidak terlepas dari sumber daya manusianya. Manusia merupakan faktor terpenting dalam proses implementasi karena manusia memiliki kemampuan pemahaman dalam suatu kebijakan bahwa akan menghasilkan terlaksananya kebijakan penanggulangan bencana dengan baik.

Proses dalam implementasi kebijakan harus didukung oleh tersedianya anggaran finansial. Namun sumber daya finansial menjadi penghambat dalam implemementasi ini. Penghambat tersebut terjadi karena keterbatasan anggaran untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan penanggulangan bencana di Kota Semarang. Informasi yang didapatkan dari informan TAGANA menyebutkan bahwa masih ada presentase kekurangan anggaran sebesar 25% untuk kegiatan penanggulangan bencana.